

**PENGARUH KEMISKINAN, KEPADATAN
PENDUDUK, TINGKAT PENYELESAIAN KASUS,
DAN JUMLAH POLISI TERHADAP TINGKAT
KEJAHATAN PROPERTI DKI JAKARTA
(2006-2013)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

DAVID STEPANUS TODOTUA
12020111140074

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : David Stepanus Todotua

Nomor Induk Mahasiswa : 12020111140074

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP

Judul Skripsi : **PENGARUH KEMISKINAN,
KEPADATAN PENDUDUK, TINGKAT
PENYELESAIAN KASUS, DAN
JUMLAH POLISI TERHADAP
TINGKAT KEJAHATAN PROPERTI
DKI JAKARTA (2006-2013)**

Dosen Pembimbing : Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP.

Semarang, 2016

Dosen Pembimbing,

(Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP.)

NIP. 196104161987101001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : David Stepanus Todotua

Nomor Induk Mahasiswa : 12020111140074

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP

Judul Skripsi : **PENGARUH KEMISKINAN,
KEPADATAN PENDUDUK, TINGKAT
PENYELESAIAN KASUS, DAN
JUMLAH POLISI TERHADAP
TINGKAT KEJAHATAN PROPERTI
DKI JAKARTA (2006-2013)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal : 19 Januari 2016

Tim Penguji :

1. Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP. (.....)
2. Dr. Dwisetia Poerwono, MSc. (.....)
3. Banatul Hayati, S.E., M.Si. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, David Stepanus Todotua, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PENGARUH KEMISKINAN, KEPADATAN PENDUDUK, TINGKAT PENYELESAIAN KASUS, DAN JUMLAH POLISI TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN PROPERTI DKI JAKARTA (2006-2013)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberika oleh universitas batal saya terima.

Semarang,

Yang membuat pernyataan,

(David Stepanus Todotua)

NIM . 12020111140074

MOTTO

“For we walk by faith, not by sight” (2 Corinthians 5:7)

ABSTRACT

Crime became one of the important social issues to be resolved because of the perceived impact is very large community both directly and indirectly. Jakarta as the capital city and one of the centers of growth was recorded as the city with the highest number of crimes in Indonesia, according to data on the number of crimes published by BPS, and the type of crime that is most common property crime. There are various factors that influence the occurrence of a property crime.

This research aimed to examine the effect of population density, poverty, crime clearance, and police ratio on property crime rate in DKI Jakarta in 2006-2013. This study uses panel data regression model with fixed effect model. The data used is a combination of time series data from 2006 to 2013 and cross section data as much as 5 administrative cities in DKI Jakarta Province. The dependent variable used in this study is property crime rate, while population density, poverty, crime clearance, and police ratio as independent variables.

The regression shows that all the independent variable has a positive and significant impact on property crime rate in DKI Jakarta.

Keywords : Property crime rate, population density, crime clearance, police ratio, DKI Jakarta

ABSTRAK

Kriminalitas menjadi salah satu masalah sosial yang penting untuk diselesaikan karena dampak yang dirasakan masyarakat sangat besar baik secara langsung maupun tidak langsung. DKI Jakarta sebagai ibukota dan salah satu pusat pertumbuhan tercatat sebagai kota dengan jumlah tindak kejahatan tertinggi di Indonesia menurut data jumlah kejahatan yang dipublikasikan oleh BPS, dan jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah kejahatan properti yaitu kejahatan yang sasarannya mengambil hak milik orang lain. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu tindak kejahatan properti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemiskinan, kepadatan penduduk, tingkat penyelesaian kasus dan rasio jumlah polisi terhadap tingkat kejahatan properti di DKI Jakarta tahun 2006-2013. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel dengan “fixed effect model”. Data yang digunakan adalah kombinasi data *time series* dari tahun 2006 sampai 2013 dan data *cross section* sebanyak 5 kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kejahatan properti dan kepadatan penduduk, kemiskinan, tingkat penyelesaian kasus, rasio jumlah polisi sebagai variabel independen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel dalam penelitian ini yaitu kemiskinan, kepadatan penduduk, tingkat penyelesaian kasus, dan jumlah polisi berpengaruh positif terhadap tingkat kejahatan properti di DKI Jakarta.

Kata kunci : Kejahatan Properti, kemiskinan, kepadatan penduduk, tingkat penyelesaian kasus, rasio jumlah polisi, DKI Jakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya selama proses penyelesaian skripsi yang berjudul **“PENGARUH KEMISKINAN, KEPADATAN PENDUDUK, TINGKAT PENYELESAIAN KASUS, DAN JUMLAH POLISI TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN PROPERTI DKI JAKARTA (2006-2013)”**. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
2. Bapak Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini
3. Bapak Dr. Hadi Sasana, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan juga selaku Dosen Wali yang telah memberikan ilmu, masukan dan nasihat selama masa pendidikan di Universitas Diponegoro
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman selama masa perkuliahan
5. Kedua orang tua dan adik-adik, Bapak Hulman Siagian dan Ibu Herlina Sianturi serta adik Michael Siagian dan Olivia Siagian yang selalu memberikan motivasi, semangat, doa, dan segala bentuk dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini

6. Teman-teman grup “S.E. tahun ini” yang tiada henti menghibur dan selalu membuat bahagia hari-hari penulis selama penyusunan skripsi
7. Keluarga besar IESP 2011 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya selama masa perkuliahan
8. Pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap semoga kekurangan dalam skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik berikutnya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang,
Penulis,

David Stepanus Todotua
12020111140074

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1.4. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TELAAH PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori	18
2.1.1 Kejahatan	18
2.1.2 Kejahatan Pencurian	19
2.1.3 Tingkat Keseimbangan Kejahatan	19
2.1.4 Penduduk dan Kepadatan Penduduk.....	23
2.1.4.1 Hubungan Kepadatan Penduduk dengan Kriminalitas	23
2.1.5 Kemiskinan	24
2.1.5.1 Hubungan Kemiskinan dengan Kriminalitas	28
2.1.6 Polisi	29
2.1.6.1 Hubungan Polisi dengan Kriminalitas	30
2.1.7 <i>Crime Clearance</i> (Tingkat Penyelesaian Kasus) dan Hubungannya dengan Kriminalitas.....	30

2.2	Penelitian Terdahulu	31
2.3	Kerangka Pemikiran	39
2.4	Hipotesis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....		41
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	41
3.2	Jenis dan Sumber Data	43
3.3	Metode Pengumpulan Data	44
3.4	Metode Analisis.....	44
3.4.1	Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	46
3.4.2	Pengujian Statistik	49
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....		53
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	53
4.1.1.	Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta.....	53
4.1.2.	Perkembangan Kejahatan Properti di DKI Jakarta.....	55
4.1.3.	Kepadatan Penduduk DKI Jakarta.....	56
4.1.4.	Kemiskinan di DKI Jakarta	57
4.1.5.	Jumlah Polisi di DKI Jakarta	59
4.1.6.	<i>Crime Clearance</i> DKI Jakarta	60
4.2	Analisis Data	61
4.2.1.	Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM).....	61
4.2.2.	Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	63
4.2.3.	Pengujian Statistik	64
4.3	Interpretasi Hasil	67
4.3.1.	Pengaruh Kepadatan Penduduk, Kemiskinan, Rasio Jumlah Polisi, dan Tingkat Penyelesaian Kasus Terhadap Tingkat Kejahatan Properti di DKI Jakarta Tahun 2006-2013	67
4.3.2.	Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Tingkat Kejahatan Properti di DKI Jakarta.....	68
4.3.3.	Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Kejahatan Properti di DKI Jakarta.....	68
4.3.4.	Pengaruh Tingkat Penyelesaian Kasus Terhadap Tingkat Kejahatan Properti di DKI Jakarta.....	69
4.3.5.	Pengaruh Rasio Jumlah Polisi Terhadap Tingkat Kejahatan Properti di DKI Jakarta.....	69

BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Keterbatasan	71
5.3 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Kejahatan di Indonesia Tahun 2006 – 2013	2
Tabel 1.2 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2006 – 2013	4
Tabel 1.3 Jumlah Kejahatan di DKI Jakarta Tahun 2006 – 2013.....	5
Tabel 1.4 Angka Kejahatan Menurut Jenisnya di DKI Jakarta Tahun 2006 – 2013..	6
Tabel 1.5 Jumlah Kejahatan Properti dan Tingkat Penyelesaian Kasus DKI Jakarta 2006-2013	6
Tabel 1.6 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk DKI Jakarta Tahun 2006 – 2013	8
Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Miskin di DKI Jakarta Tahun 2006 – 2013	10
Tabel 1.8 Jumlah Anggota Polisi DKI Jakarta Tahun 2006-2013	12
Tabel 3.1 Uji Durbin-Watson	45
Tabel 4.1 Angka Kejahatan Properti dan Tingkat Kejahatan Properti DKI Jakarta Per Kota administrasi (2006-2013)	54
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk DKI Jakarta Tahun 2006-2013	55
Tabel 4.3 Presentase Penduduk Miskin DKI Jakarta Tahun 2006-2013	56
Tabel 4.4 Rasio Jumlah Polisi (/10.000 penduduk) DKI Jakarta Tahun 2006-2013	57
Tabel 4.5 <i>Crime Clearance</i> DKI Jakarta Tahun 2006-2013	59
Tabel 4.6 Hasil Estimasi Fixed Effect Model	59
Tabel 4.7 Correlation Matric	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Permintaan dan Penawaran Kejahatan	21
Gambar 2.2 Keseimbangan Kejahatan	22
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	38
Gambar 4.1 Peta Administratif DKI Jakarta	52

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A Hasil regresi.....	74
LAMPIRAN B Uji Park.....	75
LAMPIRAN C Uji Normalitas	76
LAMPIRAN D Data Tingkat Kejahatan Properti (Kasus)	76
LAMPIRAN E Data Kepadatan Penduduk (Jiwa).....	76
LAMPIRAN F Data Tingkat Kemiskinan (%)	77
LAMPIRAN G Rasio Jumlah Polisi (Jiwa)	77
LAMPIRAN H <i>Crime Clearance</i> (Kasus)	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1997). Namun pada kenyataannya pembangunan yang ada tidak merata di setiap daerah. Ada beberapa kota yang jauh lebih maju dan akhirnya menarik banyak orang untuk datang ke kota tersebut. Hal ini memang menguntungkan bagi daerah tersebut, namun masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan kejahatan akan muncul sebagai akibat dari terlalu banyaknya penambahan penduduk tanpa diimbangi kesempatan kerja yang memadai.

Tindakan kriminal merupakan tindakan melanggar hukum dan tidak sesuai dengan peraturan dan norma (penyimpangan) yang sudah disepakati dalam suatu masyarakat. Para ahli kriminologi baru beranggapan bahwa perilaku menyimpang disebut sebagai kejahatan yang harus dijelaskan dengan melihat kondisi struktural dalam masyarakat dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, otoritas, dan kemakmuran serta kaitannya dengan berbagai perubahan ekonomi dan politik yang ada di masyarakat (Santoso, 2001). Masyarakat menentang dan berusaha menghilangkan tindakan kriminal karena tindakan kriminal menimbulkan keresahan pada masyarakat dimana masyarakat tidak lagi menjalani aktivitasnya dengan tenang.

Tindakan kriminal tergolong menjadi 4 golongan yaitu: (1) kejahatan terhadap hak milik yaitu pencurian, pembegalan, perampokan pencurian motor dan mobil, penggelapan; (2) kejahatan terhadap hak pribadi yaitu pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan; (3) perilaku yang negatif menurut pandangan masyarakat yaitu perjudian, pelacuran, dan narkoba; dan (4) pelanggaran yaitu kerusuhan, demonstrasi, dan pelanggaran lalulintas (Soekanto,2001).

Dalam melakukan tindak kejahatan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi para kriminal melakukan tindakan tersebut. Berbagai faktor tersebut adalah kemiskinan, kesempatan kerja, dan karakter pelaku yang melakukan kejahatan. Selain itu ada pula faktor lain yang mempengaruhi timbulnya kejahatan yaitu kepadatan penduduk, jumlah patroli polisi, keadaan jalan dan lingkungan, frekuensi ronda siskamling, dan faktor lainnya (Soekanto,2001). Di Indonesia tindak kejahatan memang menjadi salah satu fokus pihak kepolisian demi tercapainya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat.

Tabel 1.1
Jumlah Kejahatan di Indonesia
Tahun 2006 – 2013

Tahun	Jumlah Kejahatan (kasus)	Perkembangan Kejahatan (%)
2006	299.163	0,00
2007	330.384	10,44
2008	326.752	-1,10
2009	344.942	5,57
2010	332.490	-3,61
2011	347.605	4,55
2012	341.159	-1,85
2013	342.084	0,27

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah (2015)

Tindak kejahatan di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2006 tindak kejahatan yang terjadi berdasarkan data dari BPS adalah sebanyak 299.163 kasus. Jumlah kasus tersebut meningkat hingga mencapai angka 344.942 kasus pada tahun 2009. Kenaikan jumlah kasus ini tidaklah sedikit. Dapat dilihat pada tabel 1.1 , pada tahun 2010 terjadi penurunan kasus tindak kejahatan dimana angka tindak kejahatan yang terjadi sebesar 3,6% . Penurunan ini hanya bersifat sementara karena tindak kejahatan mengalami kenaikan lagi hingga mencapai angka 342.084 kasus pada tahun 2013.

Kasus kejahatan yang terjadi tersebut tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Pada kenyataannya kejahatan tersebut terjadi sebagian besar di daerah-daerah yang padat penduduknya. Angka kejahatan di wilayah Indonesia barat jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan wilayah Indonesia Timur. Tabel 1.2 menunjukkan jumlah tindak pidana menurut kepolisian daerah di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta dengan kepolisian daerah Metro Jaya merupakan daerah dengan tingkat kejahatan paling tinggi.

Tabel 1.2
Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah
Tahun 2006 – 2013

Kepolisian Daerah	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Aceh	986	3.053	1.517	6.297	9.244	9.114	9.200	9.150
Sumatera Utara	27.785	28.642	26.185	26.597	33.227	37.610	33.250	40.709
Sumatera Barat	9.953	9.499	10.776	11.848	10.819	11.695	13.468	14.324
Riau	6.277	9.767	8.024	8.968	10.129	8.323	12.533	9.399
Kepulauan Riau	3.442	3.233	2.998	3.494	4.141	3.643	3.626	4.278
Jambi	1.969	2.426	2.692	2.637	3.586	4.450	6.099	6.510
Sumatera Selatan	8.294	9.966	11.213	14.170	18.288	19.353	21.498	22.882
Kepulauan Bangka Belitung	1.843	2.284	2.021	2.506	2.642	2.732	5.197	2.515
Bengkulu	1.654	1.945	2.001	1.827	2.717	3.498	3.943	4.550
Lampung	6.052	6.577	6.850	9.959	4.813	6.052	4.383	4.812
Metro Jaya	66.447	53.507	63.576	57.597	41.574	40.369	15.066	32.032
Jawa Barat	22.098	22.160	23.862	27.352	16.869	29.296	27.247	24.843
Banten	1.660	1.771	1.255	2.481	3.832	3.205	3.804	4.259
Jawa Tengah	18.873	19.806	20.080	19.801	15.479	15.205	11.079	14.859
DI Yogyakarta	2.913	4.316	5.183	6.988	17.622	6.326	8.987	6.727
Jawa Timur	42.583	43.822	40.598	37.337	16.948	28.392	22.774	16.913
Bali	7.420	7.590	7.401	7.950	5.593	5.490	5.183	5.980
Nusa Tenggara Barat	6.327	6.885	7.024	8.535	10.908	9.585	10.504	8.928
Nusa Tenggara Timur	5.011	6.575	6.772	6.421	3.583	5.298	6.389	6.844
Kalimantan Barat	8.738	10.532	11.265	10.886	8.599	10.296	10.315	9.430
Kalimantan Tengah	3.100	4.080	4.213	4.097	2.734	5.682	3.219	2.983
Kalimantan Selatan	3.439	3.068	5.404	4.069	1.910	499	3.372	7.080
Kalimantan Timur	7.472	8.309	6.714	7.180	10.007	9.439	9.639	9.251
Sulawesi Utara	9.814	10.275	10.189	12.515	8.710	11.286	6.815	7.609
Gorontalo	2.724	4.421	3.754	3.917	3.080	2.602	2.458	3.735
Sulawesi Tengah	5.048	6.272	6.012	7.160	13.030	7.001	8.134	7.815
Sulawesi Selatan	14.214	16.387	16.354	16.971	15.784	22.509	18.169	17.124
Sulawesi Tenggara	1.007	5.940	6.176	6.129	6.196	6.254	7.166	7.059
Maluku	1.039	1.726	2.348	2.570	4.004	1.510	1.726	2.186
Maluku Utara	883	714	708	1.111	1.916	887	926	1.177
Papua	5.549	4.682	5.754	6.128	5.091	7.049	7.414	8.655

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah (2015)

Tabel 1.3 menunjukkan jumlah kejahatan yang dilaporkan kepada kepolisian di DKI Jakarta yang meliputi daerah administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Dapat dilihat bahwa angka kejahatan mengalami fluktuasi.

Tabel 1.3
Jumlah Kejahatan di DKI Jakarta
Tahun 2006 – 2013

Tahun	Jumlah Kejahatan (kasus)	Perkembangan Kejahatan (%)
2006	66.447	0
2007	53.507	-19,47
2008	63.576	18,82
2009	57.597	-9,40
2010	41.574	-27,82
2011	40.369	-2,90
2012	15.066	-62,68
2013	32.032	112,61

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah (2015)

Pada tahun 2006 tercatat ada sebanyak 66.447 kasus kejahatan yang dilaporkan terjadi di DKI Jakarta. Lalu pada tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 19,47% dari tahun sebelumnya yaitu tercatat sebanyak 53.507 kasus kejahatan yang dilaporkan. Pada tahun 2008 tercatat sebanyak 63.576 kasus kejahatan yang dilaporkan terjadi di DKI Jakarta. Pada tahun-tahun berikutnya jumlah kejahatan di DKI Jakarta terus berkurang.

Jumlah kejahatan pada tahun 2013 hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya dimana pihak kepolisian menerima laporan terjadi tindak kejahatan sebesar 112,6% atau sebanyak 32.032 kasus kejahatan. Angka kriminal yang paling tinggi setelah tahun 2006 terjadi pada tahun 2008 dimana terjadi krisis di negara-negara maju yang cukup berdampak pada negara-negara lain, termasuk Indonesia, meskipun dampaknya tidak terlalu besar dimana perekonomian Indonesia. Meskipun perekonomian Indonesia masih mampu bertahan pada tahun tersebut, namun bagi masyarakat berpendapatan rendah krisis ini memberikan *shock* pada keuangan mereka.

Tabel 1.4
Angka Kejahatan Menurut Jenisnya di DKI Jakarta
Tahun 2006 – 2013

Tahun	Ketertiban Melawan Ketertiban Publik	Kejahatan Teroganisir	Kejahatan Properti	Kejahatan dengan Kekerasan
2006	7.824	631	20.641	3.954
2007	7.844	598	21.764	4.246
2008	7.295	644	19.366	3.609
2009	6.449	569	12.028	3.363
2010	5.402	581	11.424	2.760
2011	4.817	845	8.091	2.815
2012	3.358	7	7.714	1.928
2013	10.190	9	6.811	3.809

Sumber : Polda Metro Jaya, 2015

Kejahatan terbagike dalam beberapa jenis dan pada daerah DKI Jakarta jenis kejahatan yang paling tinggi adalah kejahatan properti. Kejahatan properti adalah kejahatan yang tujuannya adalah mengambil kepemilikan orang lain dimana menurut kepolisian termasuk di dalamnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan maupun pencurian ringan atau pencurian biasa. Tabel 1.4 menampilkan tren jumlah kejahatan properti di DKI Jakarta tanpa Kepulauan Seribu dikarenakan berdasarkan laporan Polda Metro Jaya untuk kejahatan properti jarang terjadi di sana. Di Kepulauan Seribu sendiri kejahatan yang kerap terjadi adalah kejahatan perairan. Angka kejahatan di Jakarta selama 8 tahun secara keseluruhan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2006 tercatat sebanyak 20.641 kasus kejahatan properti yang terjadi di DKI Jakarta.

Keamanan di DKI Jakarta semakin membaik dapat dilihat dari angka kejahatan properti pada tahun-tahun berikutnya yang turun hingga 67% pada tahun 2013. Tercatat pada tahun 2013 jumlah kejahatan properti yang dilaporkan kepada

pihak kepolisian hanya sebanyak 6.811 kasus. Walaupun terjadi penurunan, angka ini masih termasuk sangat tinggi bila dibandingkan jenis kejahatan lain yang terjadi di DKI Jakarta karena jenis kejahatan ini adalah yang paling mudah dilakukan dan paling sering terjadi di ruang publik.

Tabel 1.5
Jumlah Kejahatan Properti dan Tingkat Penyelesaian Kasus
DKI Jakarta 2006-2013

Tahun	Kejahatan Properti (kasus)	Tingkat Penyelesaian Kasus (kasus)	Presentase Penyelesaian Kasus (%)
2006	20.641	3.560	17,25
2007	21.764	4.985	22,90
2008	19.366	5.035	26,00
2009	12.028	4.217	35,06
2010	11.424	3.849	33,69
2011	8.091	3.505	43,32
2012	7.714	3.585	46,47
2013	6.811	4.397	64,56

Sumber: Polda Metro Jaya, 2015

Tindak kejahatan yang terjadi tidak selalu berakhir dengan hukuman bagi para pelakunya. Tabel 1.5 menampilkan data tingkat penyelesaian kasus di DKI Jakarta. Kasus kejahatan dinyatakan selesai apabila kasus tersebut sudah masuk ke pengadilan dan pelakunya dijatuhi hukuman yang berlaku. Pada tahun 2006 dari total 20.641 kasus, kejahatan yang berhasil diselesaikan hanya sebanyak 17,25% saja. Dapat dikatakan dari 20.641, hanya 3.560 pelaku kejahatan yang mendapat hukuman sesuai hukum yang berlaku melalui pengadilan. Penyelesaian kasus berangsur meningkat setiap tahunnya dimana pada tahun 2013 dari total 6.811 kasus yang terjadi, sebanyak 4.397 kasus atau 64,5% berhasil diselesaikan.

Tingginya angka kriminalitas di suatu kota salah satunya disebabkan oleh banyaknya penduduk yang masuk ke dalam kota tersebut. Banyaknya penduduk yang berpindah ke daerah maju akhirnya menimbulkan masalah sosial baru bagi daerah itu sendiri yaitu polusi, peningkatan kerawanan keamanan, dan masalah sosial lainnya (Arsyad, 1997). Pesatnya pembangunan di Jakarta memberi keuntungan bagi perekonomian kota Jakarta. Semakin besar ekspansi kota Jakarta dan lengkapnya fasilitas menarik semakin banyak penduduk dari daerah lain untuk hijrah ke ibukota.

Glaeser & Sacerdote (dalam Husnayain, 2007) mengatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kejahatan yang terjadi di perkotaan dengan jumlah penduduk atau *city size*. Maka hal yang mungkin terjadi adalah bertambahnya jumlah penduduk kota akan berdampak pada meningkatnya kriminalitas di perkotaan.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk DKI Jakarta
Tahun 2006 – 2013

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (per Km ²)
2006	8.961.680	661,52	13.547,00
2007	9.057.993	662,33	13.676,00
2008	9.146.181	662,33	13.809,00
2009	9.223.000	662,33	13.925,00
2010	9 607 787	662,33	13.157,63
2011	9.607.787	662,33	13.157,63
2012	9.991.778	662,33	15.085,82
2013	9.969.948	662,33	15.052,84

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah (2015)

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2006. Namun pada tahun

2012 memang terjadi penurunan jumlah penduduk, namun naik kembali pada tahun 2013. Pada tahun 2006 jumlah penduduk DKI Jakarta sebanyak 8.961.680 jiwa. Angka ini meningkat terus menerus setiap tahunnya hingga pada tahun 2011 mencapai 10.187.595 jiwa. Pada tahun 2013 terjadi penambahan jumlah penduduk kembali hingga mencapai 9.969.948 penduduk tercatat sebagai warga DKI Jakarta.

Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan luas wilayah administrasi DKI Jakarta yang tetap membuat Kota Jakarta menjadi kota yang padat. Wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta adalah seluas 662,33 km² dan tidak mengalami perluasan walaupun penduduknya terus bertambah. Pada tahun 2006 kepadatan Kota Jakarta adalah sebanyak 13.547 jiwa per km². Pada tahun 2013 tercatat kepadatan Kota Jakarta adalah 15.052,84 jiwa per km². Semakin padatnya suatu kota maka akan semakin tinggi kemungkinan terjadinya aksi kejahatan di kota tersebut. Menurut teori ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi yaitu : keuntungan aksi kejahatan di kota lebih tinggi (dilihat dari harta benda korbannya) apabila dibanding di desa, kemungkinan tertangkapnya pelaku kejahatan di perkotaan akan lebih kecil karena padatnya penduduk di kota, dan menariknya kota terhadap tindak kejahatan individu (Hakim, 2009).

Tingginya jumlah penduduk DKI Jakarta salah satunya disebabkan oleh perpindahan penduduk dari desa ke kota yang cukup tinggi. Salah satu pemicunya adalah proses pembangunan yang lebih cepat di daerah perkotaan yang mendorong masyarakat untuk berpindah ke kota untuk mendapatkan lapangan pekerjaan baru dan tingkat upah yang lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Namun pada kenyataannya jumlah lapangan kerja yang dapat diciptakan dari kegiatan

perekonomian tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk. Akhirnya tingkat pengangguran di perkotaan pun akan cenderung terus meningkat.

Saat tidak memiliki pekerjaan, masyarakat tidak memiliki pendapatan dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya sesuai syarat penghidupan yang layak. Pada akhirnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi lemah tersebut akan masuk ke dalam golongan penduduk miskin. Morgan Kelly (2000) membuktikan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap kejahatan properti. Model yang digunakan adalah :

$$\text{Log}(\lambda) = \log(N) + \beta_0 \log(d) + \beta_1 \log(I) + \beta_2 \log(x) - \beta_3 \log(p)$$

λ , N , d , I , X , dan p berturut-turut adalah tingkat kejahatan, populasi, kepadatan penduduk, inequality, faktor-faktor (kemiskinan, ras, stabilitas keluarga, dan *residential mobility*), dan aktivitas polisi. Kelly membuktikan bahwa kemiskinan dan aktivitas polisi adalah dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kejahatan properti. Marina dan Budiantara (2013) juga menyatakan hal serupa. Marina dan Budiantara menggunakan beberapa variabel yaitu kepadatan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, persentase penduduk yang tidak pernah sekolah, persentase korban penyalahgunaan NAPZA, dan persentase keluarga bermasalah. Keenam variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat kejahatan di Jawa Timur.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Miskin di DKI Jakarta Tahun 2006 – 2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Presentase Penduduk Miskin (%)
2006	403.900	4,51
2007	402.800	5,33
2008	340.000	4,85
2009	337.200	3,96
2010	385.500	4,52
2011	352.730	3,46
2012	363.700	3,73
2013	369.100	3,70

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah (2015)

Dapat dilihat pada tabel 1.6 jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta. Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta memang mengalami fluktuasi namun kecenderungannya adalah meningkat. Pada tahun 2006 tercatat 4,51% penduduk termasuk dalam golongan miskin dari total jumlah penduduk DKI Jakarta. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin berkurang dimana tercatat sebanyak 402.800 penduduk yang termasuk golongan miskin. Pada tahun 2008 terjadi krisis global yang terasa dampaknya hingga Indonesia dan berdampak pula pada jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta dimana tercatat ada sebanyak 342.500 jiwa. Usaha pemerintah daerah DKI Jakarta mengurangi kemiskinan cukup berhasil dimana kemiskinan di DKI Jakarta cenderung menurun setiap tahunnya dan pada tahun 2013 tercatat hanya 3,7% dari total penduduk atau sebanyak 369.100 jiwa yang termasuk dalam golongan miskin.

Penduduk yang termasuk dalam golongan miskin adalah penduduk yang hidup dengan standar di bawah garis kemiskinan. Seseorang dikatakan miskin bila memiliki pendapatan dibawah \$1,25 atau \$2 per hari dalam perhitungan dollar PPP. Kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan perkapita, namun

berhubungan negatif dengan kemiskinan dan ketimpangan (Todaro,2009). Todaro juga mengatakan bahwa semakin miskin seseorang maka semakin jauh jangkauannya untuk mendapat fasilitas yang dapat menyejahterakannya. Penduduk miskin cenderung tidak mampu menyediakan pendidikan yang layak untuk anaknya ataupun tidak mampu mencari pinjaman untuk membuka usaha karena mereka tidak memenuhi syarat. Akhirnya penduduk miskin yang tidak berpendidikan tersebut sulit untuk mendapat pekerjaan legal karena rendahnya tingkat pendidikan. Selain itu mereka juga memiliki pengetahuan yang minim tentang norma dan hukum .

Penduduk golongan miskin inilah yang memiliki peluang besar untuk melakukan kejahatan. Ditengah keterbatasan ekonomi mereka masih harus memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup sehingga sebagian penduduk miskin memilih pekerjaan yang ilegal dan beresiko namun menghasilkan pendapatan dan terkadang menghasilkan pendapatan lebih besar bila dibandingkan dari pekerjaan legal. Keterpaksaan untuk mendapat penghasilan membuat kriminal tidak menghiraukan resiko yang dihadapinya bila tertangkap.

Menghadapi tingginya ancaman kejahatan yang meresahkan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak kriminal. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan menambah jumlah polisi yang bertugas menjaga keamanan di lingkungan sekitar tempat bertugasnya. Penambahan jumlah personil kepolisian akan membuat para pelaku kriminal berpikir ulang untuk melakukan

Tabel 1.7
Jumlah Anggota Polisi DKI Jakarta
Tahun 2006-2013

Tahun	Jumlah Polisi (jiwa)	Pertambahan Jumlah Polisi (%)
2006	11.630	0
2007	9.092	-21,82
2008	9.092	0,00
2009	9.143	0,56
2010	9.711	6,21
2011	8.516	-12,31
2012	10.161	19,32
2013	8.839	-13,01

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Pada tabel 1.7 menampilkan kekuatan polisi di DKI Jakarta yang tergabung dalam Polda Metro Jaya. Jumlah polisi yang bertugas mengamankan kota Jakarta tidak tetap setiap tahunnya. Pada tahun 2006, Polda Metro Jaya memiliki anggota polisi sebanyak 11.360 orang. Pada tahun 2011 jumlah anggota polisi yang bertugas di Jakarta hanya sebanyak 8.516 orang. Pada tahun 2012 sebanyak 19,32% polisi ditambahkan dari jumlah polisi di tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2013 jumlah polisi di DKI Jakarta dikurangi 13,01% sehingga jumlah polisi di DKI Jakarta hanya sebanyak 8.839 orang saja. Penelitian Marvell dan Moody (dikutip oleh Levitt, 2006) menemukan bahwa penambahan jumlah polisi sebesar 10% akan menurunkan angka kriminalitas sebanyak 3%. Disimpulkan juga bahwa peningkatan angka kriminalitas pada tahun tertentu akan membuat pemerintah memperkerjakan lebih banyak polisi pada tahun berikutnya. Tidak jauh berbeda dengan Marvell dan Moody, hasil penelitian Levitt (2006) menyimpulkan bahwa penambahan jumlah polisi sebesar 10% akan mengurangi angka kejahatan sebanyak 3-10%.

Jakarta merupakan Ibu Kota Republik Indonesia dimana pusat pemerintahan dan pusat perekonomian dijalankan di Jakarta. Tingginya angka kriminalitas terutama angka kejahatan properti di DKI Jakarta harusnya bisa ditekan mengingat pengamanan di Ibu Kota termasuk cukup ketat. Penelitian-penelitian terdahulu menyebutkan sebagian besar kejahatan dilakukan atas dasar motif ekonomi. Seperti diketahui bahwa tingkat pendapatan penduduk Jakarta termasuk tinggi, namun ketimpangannya juga tinggi. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin ini juga yang mendorong individu mencapai keinginannya dengan cara yang ilegal. Berbagai masalah inilah yang perlu diteliti lebih lanjut agar akar masalahnya dapat diketahui. Berdasarkan uraian diatas maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Kemiskinan, Kepadatan Penduduk, Tingkat Penyelesaian Kasus, dan Jumlah Polisi Terhadap Angka Kejahatan Properti DKI Jakarta (2006-2013)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan tingkat kejahatan paling tinggi di Indonesia dan kejahatan properti merupakan jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2006-2013. Semakin tinggi tingkat kejahatan maka semakin tinggi keresahan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemanan di DKI Jakarta perlu ditingkatkan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi kejahatan yaitu diantaranya kemiskinan, kepadatan penduduk, tingkat penyelesaian kasus, dan jumlah polisi. Keterkaitan antara kemiskinan dengan kejahatan properti adalah ketika seseorang

miskin maka orang tersebut akan melakukan segala pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya termasuk melakukan kejahatan properti. Padatnya penduduk DKI Jakarta juga menjadi masalah karena semakin padat penduduk suatu daerah maka semakin luas ruang gerak para pelaku kejahatan karena semakin kecil kemungkinan tertangkapnya. Di lain sisi jumlah polisi juga mempengaruhi keputusan para pelaku untuk melakukan aksinya, semakin banyak jumlah polisi maka semakin kecil kemungkinan para pelaku kejahatan melancarkan aksinya. Selain itu penyelesaian kasus sebagai putusan akhir dari tindak kejahatan juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan properti, semakin banyak kasus yang diselesaikan maka semakin kecil niat para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.

Dari uraian diatas muncul beberapa pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap tingkat kejahatan properti di Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana pengaruh kepadatan penduduk terhadap tingkat kejahatan properti di Provinsi DKI Jakarta?
3. Bagaimana pengaruh tingkat penyelesaian kasus terhadap tingkat kejahatan properti di Provinsi DKI Jakarta?
4. Bagaimana pengaruh jumlah polisi terhadap tingkat kejahatan properti di Provinsi DKI Jakarta?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap tingkat kejahatan properti di Provinsi DKI Jakarta
2. Mengetahui pengaruh kepadatan penduduk terhadap tingkat kejahatan properti di Provinsi DKI Jakarta
3. Mengetahui pengaruh tingkat penyelesaian kasus terhadap tingkat kejahatan properti di Provinsi DKI Jakarta
4. Mengetahui pengaruh jumlah polisi terhadap tingkat kejahatan properti di Provinsi DKI Jakarta

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menjadi masukan bagi pemerintah DKI Jakarta untuk meminimalkan tindak kejahatan properti dengan menyelesaikan masalah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan tersebut.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mencakup uraian ringkas dari materi yang dibahas pada setiap bab dalam penelitian dengan tujuan memperjelas arah pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori dengan sumber buku-buku, penelitian terdahulu, dan berbagai sumber tertulis yang mendukung penelitian ini. Dalam bab ini juga menjelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai variabel-variabel penelitian dan definisi operasional masing-masing variabel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta penjelasan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan yang menjelaskan estimasi dan juga interpretasi hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan juga membahas keterbatasan dalam penelitian. Dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait dengan tema penelitian ini.